
STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN KINERJA PERBANKAN

SPARTA*

STIE Indonesia Banking School, Jakarta, Indonesia
sparta@ibs.ac.id

SARAH HANI MAHDIYAH

STIE Indonesia Banking School, Jakarta, Indonesia
sarahhanimahdiyah@gmail.com

Abstract

This study focuses on research of relationship between ownership structure and banking performance and to know if GCG as moderation variable can strengthen their relationship. This study is using panel data covering 5 years from 32 banking firms listed in Bursa Efek Indonesia. The result shows that managerial ownership and institutional ownership are significant determinants of banking performance. However, this study do not find a significant relationship between government ownership and banking performance. Other than that, GCG as moderation variable can strengthen the relationship between managerial ownership and institutional ownership to banking performance but cannot strengthen the relationship between government ownership and banking performance.

Keywords: *managerial ownership, institutional ownership, government ownership, self assessment, ROA*

Abstrak

Penelitian ini fokus membahas hubungan struktur kepemilikan terhadap kinerja perbankan dan ingin mengetahui apakah GCG sebagai variabel moderasi dapat memperkuat hubungan mereka. Penelitian ini menggunakan data panel selama 5 tahun dari 32 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan. Namun penelitian ini tidak menemukan adanya hubungan yang signifikan antara kepemilikan pemerintah terhadap kinerja perbankan. Selain itu, GCG sebagai variabel moderasi mampu memperkuat hubungan kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap kinerja perbankan tetapi tidak dapat memperkuat hubungan kepemilikan pemerintah terhadap kinerja perbankan.

Kata Kunci: kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan pemerintah, self assessment, ROA

*) Corresponding Author

PENDAHULUAN

Dalam mengukur kinerja perusahaan perbankan dapat menggunakan analisis laporan keuangan, salah satunya adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas perbankan digunakan investor untuk menilai seberapa baik kondisi perusahaan tersebut. Oleh karena itu, bank perlu mempertahankan kinerja perusahaan sebaik mungkin. POJK Nomor 39/POJK.03/2017 menjelaskan bahwa struktur kepemilikan perbankan Indonesia dengan adanya kepemilikan tunggal dapat membantu bank dalam menghadapi perubahan perekonomian yang akan terus berkembang. Kepemilikan tunggal merupakan kondisi dimana hanya ada satu Pemegang Saham Pengendali (PSP) dalam suatu perusahaan. PSP dapat berupa badan hukum, perseorangan, atau kelompok usaha yang memiliki hak suara karena kepemilikan saham yang lebih dari 25% dari jumlah keseluruhan saham yang dikeluarkan. Semakin besar saham yang dimiliki maka semakin besar kemampuannya dalam memberikan wewenang dan mengendalikan aktivitas bank sehingga kinerja keuangan bank dapat tercapai dengan baik. Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia (SPI), rata-rata *return on assets* (ROA) perbankan di Indonesia periode 2014-2018 bergerak secara fluktuasi. ROA pada tahun 2014 sebesar 2.85%, tahun 2015 sebesar 2.32%, tahun 2016 sebesar 2.23%, tahun 2017 sebesar 2.45%, dan tahun 2018 sebesar 2.55%. Oleh karena itu, terdapat faktor-faktor yang menyebabkan perubahan naik atau turunnya rata-rata nilai ROA. Wiranata & Nugrahanti (2014) menyatakan bahwa karakteristik struktur kepemilikan di Indonesia memiliki kecenderungan pemilik perusahaan untuk duduk sebagai dewan direksi atau komisaris. Pemegang saham dapat dimiliki secara individu, lembaga, maupun pemerintah yang menjadikan adanya hubungan dengan struktur kepemilikan. Menurut Ritha (2016) struktur kepemilikan dapat memengaruhi kinerja perusahaan. Oleh karena itu, kinerja perusahaan dipengaruhi oleh beragam struktur kepemilikan seperti, kepemilikan manajer (Saleh et al. 2017; Saifi, 2019; Elvin et al. 2016), kepemilikan institusional (Puniyasa & Triaryati, 2016; Saifi, 2019; Saleh et al., 2017), dan kepemilikan pemerintah (Wiranata & Nugrahanti, 2013; Nugrahanti & Novia, 2012; Hunardy & Tarigan, 2017). Namun, hasil penelitian faktor-faktor di atas belum menunjukkan hasil yang konsisten.

Berdasarkan latar belakang dan masalah di atas, maka perumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut: 1) Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja perbankan?; 2) Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja perbankan?; 3) Apakah kepemilikan pemerintah berpengaruh terhadap kinerja perbankan?; 4) Apakah peran corporate governance dapat memperkuat pengaruh struktur kepemilikan manajerial terhadap kinerja perbankan?; 5) Apakah peran corporate governance dapat memperkuat pengaruh struktur kepemilikan institusional terhadap kinerja perbankan?; 6) Apakah peran corporate governance dapat memperkuat pengaruh struktur kepemilikan pemerintah terhadap kinerja perbankan?

LANDASAN TEORI

Teori Keagenan

Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa teori keagenan muncul ketika satu orang atau lebih (prinsipal) mempekerjakan orang lain (agen) untuk memberikan suatu jasa kemudian mendelegasikan wewenang dalam pengambilan keputusan. Prinsipal merupakan pihak investor sedangkan agen adalah manajemen perusahaan. Hubungan antara manajemen dan pemegang saham dapat menimbulkan *asymmetric information*. *Asymmetric information* merupakan ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh manajemen dan pemegang saham. Hal ini disebabkan, kedudukan manajemen cenderung memiliki informasi yang lengkap dari pemegang saham sehingga manajemen dapat sengaja menyembunyikan informasi. Manajemen tidak hanya memiliki tanggung jawab untuk mengelola perusahaan, akan tetapi manajemen juga didorong untuk bisa memberikan keuntungan bagi prinsipal. Keuntungan tersebut merupakan laba yang dihasilkan dari pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Keuntungan tersebut membuat manajemen memiliki keinginan untuk memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri, sehingga terjadinya perbedaan kepentingan (Jensen & Meckling, 1976). Dalam keterkaitannya dengan struktur kepemilikan, perbedaan kepentingan ini dapat menimbulkan *agency conflict*. *Agency conflict* ini terjadi apabila salah satu pihak antara pemegang saham atau pengelola lebih menekankan kepentingan pribadinya dibandingkan kepentingan bersama dan berujung memengaruhi kondisi

kinerja keuangan.

Struktur kepemilikan

Puniyasa & Triaryati (2016) menyatakan bahwa struktur kepemilikan adalah proporsi saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang dihitung berdasarkan jumlah saham yang dimiliki dibagi dengan seluruh saham yang ada, sehingga menghasilkan presentase kepemilikan. Presentase ini dapat menggambarkan 2 bentuk bagian kepemilikan, yaitu kaum mayoritas dan minoritas. Semakin besar jumlah saham yang dimiliki, maka potensi pemegang saham untuk berkontribusi terhadap perusahaan semakin besar. Penelitian ini menggunakan struktur kepemilikan manajerial, struktur kepemilikan institusional, dan struktur kepemilikan pemerintah.

Menurut Rode & Dewi (2019), Kepemilikan manajerial merupakan jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan dengan jumlah saham yang beredar. Proporsi kepemilikan saham antara pengelola dan pemilik dapat menggambarkan adanya kepentingan yang sama dalam mencapai tujuan sehingga besarnya proporsi yang dimiliki maka akan menggambarkan besarnya keselarasan yang dimiliki manajemen dan pemegang saham lain (Puniyasa & Triaryati, 2016).

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan yang dimiliki suatu lembaga atau individu langsung seperti bank, lembaga asuransi, perusahaan investasi, investor, dan kepemilikan institusi lainnya (Suhardjanto et al., 2017). Menurut Saifi (2019), mayoritas institusi memiliki saham dalam proporsi yang besar. Kepemilikan yang besar membuat institusi ini memiliki kekuatan untuk mengawasi kegiatan manajemen. Hal ini disebabkan oleh, perhatian institusi dalam menjaga investasi yang dikelola oleh manajemen. Sehingga, Pengawasan tersebut dilakukan oleh institusi agar manajemen fokus meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

Kepemilikan pemerintah adalah kondisi dimana pemerintah memiliki sejumlah saham pada perusahaan yang terdaftar di go public. Menurut Suhardjanto et al. (2017), investasi pemerintah dalam bentuk saham merupakan salah satu cara pemerintah dalam melakukan privatisasi. Privatisasi merupakan kondisi dimana pemerintah memberikan wewenangnya kepada perusahaan perseroan. Hal ini dilakukan agar pemerintah dapat menjaga stabilitas sistem keuangan. Menurut Hunardy & Tarigan (2017), kepemilikan pemerintah dipercaya dapat menggabungkan 2 kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen. Salah satu peran pemerintah adalah menjaga stabilitas sistem keuangan. Sehingga, aturan serta mekanisme pemerintah dalam keuangan dapat memberikan efisiensi serta efektifitas dalam meningkatkan kinerja keuangan.

Good Corporate Governance

Forum for Corporate Governance in Indonesian (FCGI, 2001) menjelaskan, GCG adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Menurut Jensen & Meckling (1976), hubungan antara pemegang saham dengan manajemen dapat menimbulkan agency conflict. Agency conflict yang disebabkan oleh benturan kepentingan yang dimiliki masing-masing. Sehingga, perlu dilakukannya pemisahan kepentingan antara pemegang saham dan manajemen (Katsurayya & Sufina, 2017). Selain itu, mekanisme serta aturan yang dimiliki oleh GCG dianggap mampu mengatasi permasalahan agensi (Nugrahanti & Novia, 2012).

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN No: PER-01/MBU/2011 tentang penerapan *Good Corporate Governance*, terdapat 5 (lima) prinsip dasar yaitu Transparansi (transparency), Akuntabilitas (Accountability), Responsibilitas (Responsibility), Independensi (independency), dan Kewajaran (fairness).

Mekanisme Good Corporate Governance

Self Assessment merupakan penilaian sendiri atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang penerapan tata kelola bagi Bank Umum menjelaskan bahwa penilaian sendiri ini dimaksudkan untuk memetakan kekuatan

(strength) dan kelemahan (weakness) atas pelaksanaan tata kelola perusahaan dikelompokkan dalam *governance structure, process, dan outcome*.

Peraturan OJK Nomor 55/POJK.03/2016 dan Surat Edaran OJK Nomor 13/SEOJK.03/2017 menjelaskan bahwa bank diwajibkan untuk menerapkan GCG pada bank. Salah satu penilaian GCG bank adalah *Self Assessment*. *Self Assessment* merupakan bentuk penilaian sendiri terhadap perusahaannya dan menjelaskan seberapa besar kekuatan dan kelemahan tata kelola yang ada di perusahaan. Pelaksanaan GCG *Self Assessment* dinyatakan dengan peringkat satu, dua, tiga, empat, dan lima. Peringkat tersebut merupakan hasil dari 11 (sebelas) faktor penilaian *self assessment* yang ditetapkan dalam aturan BI Nomor 9/12/DPNP. Hasil pemeringkatan dari penilaian masing-masing faktor dikalikan dengan bobot yang dimiliki. Hasil perhitungan dijumlahkan sehingga dapat menghasilkan nilai komposit. Nilai komposit akan diklasifikasikan pada predikat komposit peringkat 1 dengan predikat sangat baik, peringkat 2 dengan predikat baik, peringkat 3 dengan predikat cukup baik, peringkat 4 dengan predikat kurang baik, dan peringkat 5 dengan predikat tidak baik. Oleh karena itu, baik atau buruknya kualitas tata kelola perusahaan dapat dilihat berdasarkan posisi peringkat yang diperoleh.

Kinerja Perbankan

Kinerja perbankan digunakan untuk melihat seberapa efisiensinya bank memperoleh laba yang diharapkan (Kuncoro & Suhardjono, 2011). Kinerja perbankan dapat diukur dengan menggunakan profitabilitas dan efisiensi. Pengukuran kinerja perbankan dari efisiensi diukur dengan Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO). BOPO merupakan pengukuran efisiensi dengan membandingkan total biaya operasi dengan total pendapatan operasi (Kuncoro & Suhardjono, 2011). Dari sisi profitabilitas, kinerja perbankan diukur dengan rasio *Return on Equity* (ROE) dan *Return on Asset* (ROA). ROE merupakan pengukuran kinerja dengan menggunakan kemampuan laba yang diperoleh dari investasi, sedangkan ROA mengukur laba yang diperoleh dari pengelolaan aset.

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan skala pengklasifikasian besar atau kecilnya perusahaan. Semakin besar ukuran sebuah perusahaan maka semakin besar modal yang diperlukan perusahaan dalam meningkatkan kinerja perusahaan (Ritha, 2016). Penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan berdasarkan nilai aset yang ada pada laporan keuangan. Hal ini dikarenakan, nilai aset menggambarkan jumlah kekayaan yang ada pada perusahaan sehingga dapat mengklasifikasikan perusahaan ke dalam skala kecil atau besar.

Pengembangan Hipotesis

Penelitian yang dilakukan Puniyasa & Triaryati (2016), Rode & Dewi (2019), dan Ritha (2016) menjelaskan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Ketika proporsi saham manajerial besar maka, kontrol yang dimiliki manajer untuk mengelola perusahaan semakin besar. Selain itu, kepemilikan manajerial dapat menggambarkan adanya kepentingan yang sama antara pemegang saham dengan manajer (Puniyasa & Triaryati, 2016).

Hal ini sejalan dengan teori keagenan yang menjelaskan bahwa kinerja perusahaan dapat tercapai apabila konflik antar pemegang saham dengan manajer diminimalisir (Jensen & Meckling, 1976). Ketika hubungan baik tercipta antara pemegang saham dan manajer, maka manajer merasa termotivasi oleh pemegang saham (Hunardy & Tarigan, 2017). Oleh karena itu, manajer akan berusaha memaksimalkan kinerjanya untuk meningkatkan hasil kinerja perusahaan (Ritha, 2016). Berdasarkan uraian di atas, kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Dengan demikian penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan

Penelitian yang dilakukan Nugrahanti & Novia (2012), Nilayanti & Suaryana (2019), dan Hendratni et al. (2018) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Hal ini disebabkan oleh, proporsi yang besar membuat suatu institusi memiliki wewenang dalam perusahaan untuk mengontrol perusahaan termasuk mengawasi segala kegiatan manajemen (Hunardy & Tarigan, 2017). Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingginya

kepemilikan institusional dapat menghambat tindakan opportunistik (mementingkan kepentingan pribadi) manajer serta membantu dalam meningkatkan kinerja perusahaan (Nilayanti & Suaryana, 2019).

Sesuai dengan teori keagenan, seorang manajer yang memiliki kecenderungan dalam melakukan tindakan opportunistik, hal ini disebabkan informasi yang dimiliki manajer jauh lebih banyak dibanding<:an dengan informasi yang dimiliki oleh pemegang saham (Jensen & Meckling, 1976). Oleh karena itu, perlu ditingkatkannya kemampuan pengawasan yang diberikan pemegang saham kepada manajer. Berdasarkan analisa dan uraian diatas maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H2: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan

Menurut Suhardjanto et al. (2017), kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Kepemilikan pemerintah dipercaya dapat menggabungkan kepentingan pemegang saham dengan kepentingan manajemen (Hunardy & Tarigan, 2017). Disamping itu, perusahaan tidak hanya menetapkan kinerja perusahaannya tetapi menetapkan target return yang akan diberikan kepada pemerintah (Suhardjanto et al., 2017). Pemerintah tidak semata-mata hanya menerima return, akan tetapi pemerintah akan turut membantu dalam pengawasan kinerja keuangan.

Salah satu permasalahan agency conflict adalah ketidakpercayaan pemegang saham dengan manajemen, karena manajer memiliki kecenderungan dalam memberikan informasi yang kurang jelas kepada pemegang saham. Oleh karena itu, perusahaan dapat mencapai target secara efektif dan meminimalisir terjadinya agency conflict yang dapat terjadi dikarenakan adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dengan agen (Jensen & Meckling, 1976). Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H3: Kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan

Hasil penelitian Puniyasa & Triaryati (2016), Rode & Dewi (2019), dan Ritha (2016) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh dalam kegiatan operasional perusahaan. Menurut Ritha (2016), manajer memiliki kemampuan dalam mengimbangi kepentingannya dengan kepentingan pemegang saham. Oleh karena itu, manajer tidak hanya sebagai pengelola tetapi manajer dapat menyatukan kepentingannya dengan pemegang saham dan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.

Jensen & Meckling (1976) menjelaskan bahwa hubungan manajer dengan pemegang saham dapat menimbulkan agency conflict serta tindakan manajer memiliki kecenderungan untuk melakukan opportunistik. Salah satu faktor yang dapat memengaruhi kinerja keuangan adalah GCG (Rode & Dewi, 2019). Hal ini disebabkan oleh mekanisme yang dimiliki GCG dapat memberikan perlindungan serta jaminan kepada hak pemegang saham. Oleh sebab itu, kemampuan manajer dalam menyetarakan kepentingannya dapat mengatasi agency conflict. Sehingga permasalahan pada agency conflict dapat ditangani.

GCG merupakan sebuah aturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hubungan yang ada pada pemegang saham dan manajemen (FCGI, 2001). Aturan tersebut dapat memengaruhi manajemen dalam mengelola perusahaan. Menurut Nilayanti & Suaryana (2019), GCG dapat menghambat tindakan manajer untuk melakukan opportunistik. Hal ini menyebabkan, ruang gerak yang dimiliki manajer terbatas sehingga manajer dapat memaksimalkan kinerjanya, dan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Dengan demikian penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4a: Peran GCG memperkuat hubungan kepemilikan manajerial dan kinerja Perbankan

Nugrahanti & Novia (2012), Nilayanti & Suaryana (2019), dan Hendratni et al. (2018) menjelaskan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Keberadaan institusi pada perusahaan merupak'an monitoring bagi perusahaan. Semakin besar kepemilikan institusi maka semakin tinggi pengawasan institusi terhadap manajer

(Ritha, 2016). Oleh karena itu, tindakan pengawasan institusi dapat memfokuskan manajer dalam meningkatkan kinerjanya sehingga mendorong manajer untuk menghasilkan kinerja perusahaan yang baik (Nugrahanti & Novia, 2012).

Disamping itu, terdapat sebuah mekanisme GCG yang mewajibkan perusahaan untuk menilai seberapa baik penerapan GCG pada perusahaan. Semakin baik nilai GCG maka semakin baik kinerja manajer dalam mengelola sumber daya yang ada. Oleh karena itu, dengan pengawasan institusi memberikan dorongan kepada manajemen untuk menghasilkan kinerja yang baik. Sesuai dengan teori keagenan, monitoring dapat membantu mengatur hubungan antara manajemen dan pemegang saham, agar tidak terjadi permasalahan yang timbul dikemudian hari (Jensen & Meckling, 1976). Dengan demikian penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

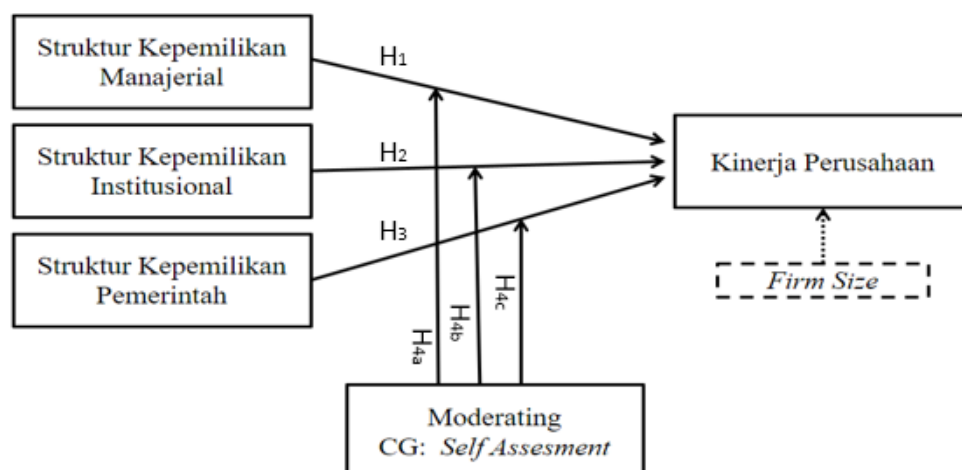
H4b: Peran GCG memperkuat hubungan kepemilikan institusional dan kinerja perbankan

Menurut Suhardjanto et al. (2017), pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Ketika pemerintah melaksana salah satu tugasnya untuk menstabilkan perekonomian suatu negara, maka pemerintah dapat melakukan kontribusi dalam perusahaan dengan cara berinvestasi (Hunardy & Tarigan, 2017). Hal ini dilakukan pemerintah untuk membantu perusahaan dalam mencapai kinerja yang aktif dan efisiensi. Oleh karena itu, terdapat peraturan tentang mekanisme GCG yang perlu diterapkan seperti, peraturan OJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang penerapan GCG bagi bank umum. Penerapan GCG dimaksudkan untuk melindungi pihak eksternal seperti pemegang saham, stakeholders, dan lainnya (Rode & Dewi, 2019). Oleh karena itu, penerapan GCG dapat membangun tingkat kepercayaan pemegang saham dan pihak lainnya terhadap manajemen.

Sejalan dengan teori keagenan Jensen & Meckling (1976) menjelaskan bahwa manajemen memiliki kecenderungan untuk mengutamakan kepentingan pribadinya dibandingkan pemegang saham. Hal ini dapat menimbulkan konflik antar kepentingan pemegang saham dengan manajemen, karena dapat memengaruhi hubungan yang terjalin. Semakin baik hubungan antar pemegang saham dengan manajer maka kinerja yang dihasilkan dapat menjadi lebih baik. Oleh karena itu, mekanisme GCG dapat memengaruhi perusahaan dalam meningkatkan kinerjanya. Dengan demikian penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4c: Peran GCG memperkuat hubungan kepemilikan pemerintah dan kinerja Perbankan

Kerangka Penelitian



Gambar 1. Kerangka Penelitian

METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang secara konsisten *listing* dan mempublikasikan laporan keuangannya dalam kurun waktu 2014-2018. Sumber data penelitian diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.com) dan situs resmi dari masing-masing bank. Penelitian ini menggunakan variabel independen, variabel

moderasi, dan variabel kontrol. Sampel penelitian adalah 32 perusahaan dengan periode Lima tahun, sehingga terdapat 160 observasi pada penelitian ini. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$ROA_{it} = f_{lo} + f_{l1}KM_{it} + f_{l2}Kht + f_{l3}KP_{it} + f_{l4}GCG_{it} + f_{l5}(KM_{it} * GCG_{it}) + \{36(Klit * GCG_{it}) + \{37(KP_{it} * GCG_{it}) + C8SIZE_{it} + \epsilon$$

Keterangan:

ROA_{it} = Return on Assets, perusahaan i periode t

KMit = Kepemilikan manajerial

Klit = Kepemilikan institusional

KPit = Kepemilikan pemerintah

GCG_{it} = Good Corporate Governance

SIZE_{it} = Ukuran perusahaan

ε = Error

ANALISI DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis data panel, *fixed effect model* adalah model terbaik untuk penelitian ini. Data terdistribusi normal dan penelitian ini terbebas dari multikolinearitas, heterokedastisitas, dan autokolinearitas. Sehingga, penelitian ini telah lolos uji asumsi klasik. Berikut perolehan hasil analisis persamaan regresi:

$$ROA_{i.t} = 0.049440 - 0.175184 KM_{it} + 0.043128 Kht + 0.074445 KP_{it} + 0.002477 GCG_{it} + 0.085974 KM_GCG_{it} - 0.023295 Kl_GCG_{it} - 0.013154 KP_GCG_{it} - 0.001362 Sf ZE_{it}$$

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kep. Manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja perbankan. Hal ini disebabkan, rata-rata kepemilikan manajerial tidak memiliki proporsi yang besar. Kepemilikan yang besar membuat memberikan kewenangan, kesempatan, serta peluang manajer untuk melakukan tindakan oportunistik dan membatasi informasi sehingga memengaruhi tingkat kepercayaan investor terhadap manajemen. Oleh karena itu, semakin besar manajer menyalahgunakan wewenangnya dapat menurunkan kinerja keuangan perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Saleh et al. (2017). Namun, penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda dari Puniyasa & Triaryati (2016), Rode & Dewi (2019), dan Ritha (2016) yang menyatakan Kep. Manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan.

Kep. Institusional berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perbankan. Kepemilikan yang besar membuat sebuah institusi memiliki wewenang dalam mengawasi segala keeiatan manajer. Sejalan dengan teori keagenan dimana manajer memiliki kecenderungan *opportunistic*. Oleh karena itu, kemampuan yang dimiliki institusi dapat menghambat tindakan *opportunistic* manajer sehingga manajer dapat fokus dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Sejalan dengan teori keagenan, manajer memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan oportunistik. Selain itu, tugas manajer tidak hanya mengelola perusahaan tetapi, manajer perlu memenuhi permintaan pemegang saham sehingga manajer fokus dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Akan tetapi, permintaan pemegang saham yang tinggi serta keterbatasan ruang gerak manajer dapat menghambat manajer dalam mengelola perusahaan. Oleh sebab itu, menurunkan perolehan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, memantau manajer dapat mempersempit kesempatan manajer untuk melakukan tindakan oportunistik sehingga akan meningkatkan kinerja perusahaan. Didukung penelitian Suhardjanto et al., (2017), Hendratni et al., (2018), Nugrahanti & Novia, (2012), dan Nilayanti & Suaryana (2019). Namun, hasil berbeda dari penelitian Saleh et al., (2017) dan Rahman & Reja (2015) yang menyatakan bahwa Kep. Institusional berpengaruh negatif terhadap kinerja perbankan.

Kep. Pemerintah tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan. Keberadaan pemerintah dianggap dapat menghambat sektor keuangan perusahaan (Nugrahanti & Novia, 2012). Hal ini disebabkan oleh, kepentingan pemerintah yang tidak memberikan keuntungan bagi pemegang saham. Selain itu, perbedaan hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kepemilikan pemerintah tidak

berpengaruh terhadap kinerja perbankan. Salah satu kemungkinan disebabkan oleh, jumlah perusahaan yang memiliki proporsi pemerintah sedikit. Pada sampel penelitian ini hanya terdapat 6 perusahaan bank yang memiliki proporsi kepemilikan pemerintah dari 32 perusahaan bank yang dijadikan sampel penelitian sehingga, hasil statistik tidak dapat menggambarkan pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap kinerja perbankan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Nugrahanti & Novia (2012). Namun, hasil berbeda dari penelitian Suhardjanto et al. (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

Size sebagai variabel kontrol menunjukkan bahwa size berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Hal ini disebabkan oleh penggunaan total aset sebagai pengukuran size. Selain itu, size dapat menggambarkan seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan. Semakin besar nilai total aset maka semakin besar kemampuan perusahaan dalam meningkatkan kinerja perusahaannya (Ritha, 2016). Berdasarkan hasil penelitian dari 32 bank umum yang terdaftar di BEI menunjukkan bahwa perbankan yang ada di Indonesia sudah mampu mengelola aset yang dimiliki dengan baik. Hasil pengujian ini didukung oleh penelitian Hendratni et al. (2018), Ritha (2016), dan Nugrahanti & Novia (2012).

Peran GCG dapat memoderasi dengan arah positif hubungan antara kepemilikan manajerial dengan ROA. Tjondro & Wilopo (2011), semakin baik peringkat yang diperoleh maka akan meningkatkan kinerja perusahaan. Hal ini disebabkan oleh, proporsi kepemilikan manajer yang besar dapat memberikan kesempatan bagi manajer dalam mengambil keputusan serta mengelola perusahaan. Selain itu, peraturan dan mekanisme GCG wajib dipatuhi oleh perusahaan sehingga, peraturan tersebut dapat menghambat serta mempersempit kesempatan manajer dalam melakukan tindakan opportunistik. Hasil penelitian ini, sejalan dengan penelitian Puniyasa & Triaryati (2016), Rode & Dewi (2019), dan Ritha (2016). Selain itu, penelitian Tjondro & Wilopo (2011) menyatakan bahwa GCG dapat memperkuat hubungan positif struktur kepemilikan terhadap kinerja perusahaan.

Peran GCG dapat memoderasi dengan arah negatif hubungan kepemilikan institusional terhadap ROA. Menurut Rode & Dewi (2019), mekanisme serta aturan GCG dianggap mampu memberikan perlindungan serta jaminan kepada hak pemegang saham. Selain itu, peran GCG juga digunakan sebagai media yang dapat mengatasi permasalahan manajemen dan pemegang saham (FCGI, 2001). Akan tetapi hasil statistik menjelaskan bahwa peran GCG tidak dapat memperbaiki permasalahan diantara manajer dan pemegang saham. Sejalan dengan penelitian Saleh et al. (2017) dan Rahman & Reja (2015). Selain itu, penelitian dari Ferdiant et al. (2014) yang menyatakan bahwa GCG dapat memperkuat hubungan Kep. Institusional dan kinerja perbankan.

Peran GCG tidak dapat memoderasi hubungan kepemilikan pemerintah terhadap ROA. Kemungkinan penyebabnya adalah peran dari penilaian GCG pada perbankan tidak dapat membantu memperbaiki hubungan kepemilikan pemerintah terhadap kinerja perbankan. Dapat disimpulkan bahwa ada atau tidaknya peran GCG tidak dapat memengaruhi hubungan kepemilikan pemerintah terhadap kinerja perusahaan. Pemerintah sendiri memiliki peran penting dalam stabilitas perekonomian negara. Peran penting dalam sektor yang besar membuat pemerintah tidak begitu memperhatikan bagaimana kualitas perusahaan tersebut agar menarik pemegang saham lainnya. Akan tetapi, keberadaan pemerintah dalam struktur kepemilikan perusahaan menjadi salah satu penunjang pemerintah untuk mempermudah proses menstabilkan perekonomian negara. Selain itu, bank juga menjadi mediasi pemerintah dalam mengontrol kondisi keuangan negara saat ini. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nugrahanti & Novia (2012). Selain itu, Siahaan (2013) menjelaskan bahwa GCG tidak dapat memperkuat hubungan Kep. Pemerintah dan kinerja perusahaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja perbankan.
2. Kepemilikan Institusional berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perbankan.

3. Kepemilikan Pemerintah tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan. Peran Self Assessmen dapat memoderasi secara positif dalam hubungan kepemilikan manajerial terhadap kinerja perbankan.
4. Peran Self Assessmem dapat memoderasi secara negatif dalam hubungan kepemilikan institusional terhadap kinerja perbankan.
5. Peran Self Assessmen tidak dapat memoderasi dalam hubungan kepemilikan pemerintah terhadap kinerja perbankan.
6. *Size* berpengaruh positif dalam mengontrol kinerja perusahaan.

Saran

1. Penelitian selanjutnya, bisa menggunakan sample penelitian selain perbankan.
2. Penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambahkan Return on Equity (ROE) dalam mengukur kinerja perbankan.
3. Penelitian selanjutnya, untuk mengetahui hubungan dari kepemilikan pemerintah dapat melakukan penelitian yang fokus membahas hubungan dari kepemilikan pemerintah terhadap kinerja perusahaan perbankan.
4. Penelitian selanjutnya, bisa menambahkan variabel lain seperti struktur kepemilikan publik dan kepemilikan asing.
5. Penelitian selanjutnya, menggunakan variabel moderasi selain Self Assessmen seperti komite audit independensi, jumlah komite audit, ukuran dewan direksi, dan lain sebagainya yang mudah ditemukan sebagai refensi penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- FCGI. (2001). Peranan dewan komisaris dan komite audit dalam pelaksanaan corporate governance (Tata Kelola Perusahaan).
- Ferdyant, F., Anggraini ZR, R., & Takidah, E. (2014). Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance dan Risiko Pembiayaan terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 1(2), 134-149.
- Hendratni, T. W., Nawasih, N., Indriati, T., & Universitas, B. (2018). Analisis pengaruh corporate governance terhadap kinerja keuangan sektor perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 3(1), 37-52.
- Hunardy, N., & Tarigan, J. (2017). Pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap kinerja keuangan melalui dewan komisaris independen sebagai variabel intervening. *Business Accounting Review*, 5(2), 601-612.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
[https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Katsurayya, H., & Sufina, L. (2017). Pengaruh Konvergensi IFRS terhadap Manajemen Laba dengan Mekanisme Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014, 13(1), 77-96. . Kuncoro, M., & Suhardjono. (2011). *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*. BPFE-yogyakarta.
- Nilayanti, M., & Suaryana, I. G. N. A. (2019). Pengaruh kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan kebijakan deviden sebagai pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(2), 906-936.
- Nugrahanti, Y. W., & Novia, S. (2012). Mekanisme corporate governance terhadap kinerja perbankan. *Jurnal Manajemen*, 11(2), 151-170.
- Puniayasa, M., & Triaryati, N. (2016). Pengaruh good corporate governance, struktur kepemilikan dan modal intelektual fakultas ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 5(8), 5304-5332.
- Rahman, A. N. A. A., & Reja, B. A. F. M. (2015). Ownership Structure and Bank Performance. *Journal of Economics Business and Management*, 3(May).
<https://doi.org/10.7763/JOEBM.2015.V3.232>
- Ritha, H. (2016). Pengaruh struktur kepemilikan dan ukuran (size) perbankan terhadap kinerja perbankan 2009-2014. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, VJJI(September)*.
- Rode, C. D., & Dewi, A. S. (2019). Pengaruh good corporate governance dan !average terhadap

- kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jurnal STIE KBP, 1-12.
- Saifi, M. (2019). Pengaruh corporate governance dan struktur kepemilikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Skripsi Universitas Brawijaya, 1-11.
- Saleh, M., Zahardin, G., & Octaviani, E. (2017). Ownership structure and corporate performance: Evidence from property and real estate public companies in Indonesia. *Investment Management and Financial Innovations*, 14(2), 252-263. [https://doi.org/10.21511/imfi.14\(2-1\).2017.10](https://doi.org/10.21511/imfi.14(2-1).2017.10)
- Suhardjanto, D., Alwiyah, Jatmiko, & Ajibroto, N. (2017). Ownership structure and financial performance : an empirical study of listed airlines industry in Asia and Australia. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 6(1), 121-130.